

Implementasi Program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang

¹⁾Egy Bramantya Akbar, ²⁾Hartuti Purnaweni, ³⁾Aloysius Rengga

¹⁾FISIP-Jurusan Administrasi Publik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof.Soedarto, SH Tembalang 12693, Semarang
Email: egybramantya@rocketmail.com

²⁾³⁾Dosen Fakultas ISIP-Jurusan Administrasi Publik, UNDIP
Email: hartutipurnaweni@gmail.com,

Abstract

Health is a major factor for a nation in order to carry out the construction. Air is essential for life, as a natural resource that is vital for life, then the decrease in air quality is very influential for the survival of humans and other living beings, so that air quality must be maintained. To protect air quality control measures against sources of air pollutants and to activities that have the potential to pollute the air, such as smoking. One of the efforts made by the government through the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is a program No-Smoking Area. No-Smoking Area program is a program that is set up where only place allowed to smoke, such as public places and transport, etc. Through this program, the central government provide a smoke-free policies to places that become Smoking Area.

This research was conducted in Poncol Station Semarang City which is one of the crowded station in Semarang. The research was based on the fact that in its implementation, still there are problems such as the persistence of the violation of the public who smoke in any place. The aim of this study is to describe and analyze how the implementation Smoking Area Program in Semarang and describe the supporting factors and obstacles in the implementation of programs Smoking Area in Poncol Station Semarang.

Based on research, program implementation Smoking Area in Poncol Station Semarang is still not optimal. Therefore, the recommendations can be given is to improve the smoking area to create a smoking room, so the smoke of the active smokers do not get out of the room that has been provided and the utilization Smoking Area program can be more optimally.

Keywords: *Health, Implementation, Smoke-Free Areas*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

yang mulai merokok sebelum berumur 19 tahun meningkat dari 69% tahun 2001 menjadi 78% pada tahun 2004 (Cahyo,Rokok,Pola dan Pemasaran) Banyak perokok berat bahkan dari usia SD sampai orang dewasa meningkat hingga 12 kali lipat (Kemenkes, 2012) .

Tindak lanjut dari adanya dampak rokok bagi kesehatan manusia dan lingkungan adalah pemerintah daerah Kota Semarang membuat Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok Semarang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) Kota Semarang.

Manfaat Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (Pedoman KTR,2011)

ketertarikan peneliti untuk melihat pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang khususnya Stasiun Poncol yang menjadi lokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di Stasiun Poncol Semarang karena Stasiun Poncol

Semarang merupakan salah satu stasiun besar yang ada di Kota Semarang dan adanya kecenderungan kelas ekonomi rendah lebih sulit untuk lepas dari rokok. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat apakah dalam pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok ini dapat berjalan dengan baik atau masih terkendala oleh berbagai faktor-faktor penghambat pelaksanaannya.

Melihat pemaparan diatas dan juga identifikasi masalah yang telah dijelaskan serta melihat data yang ada, maka penelitian ini berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KAWASAN TANPA ROKOK DI STASIUN PONCOL KOTA SEMARANG”**

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Kota Semarang khususnya di Stasiun Poncol
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kebijakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Kota Semarang khususnya di Stasiun Poncol

C. Teori

Implementasi yang digunakan menggunakan pendekatan Top-Down (George C. Edward III) terdapat 4 faktor yaitu :

1. Komunikasi

Penyampaian informasi yang intensif dan akurat mengenai program Kawasan Tanpa Rokok dari pelaksana program (Dinas Kesehatan) kepada pemegang program di Stasiun Kereta Api Poncol Kota Semarang

2. Sumber daya

- a. Menjamin ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten dalam jumlah yang memadai untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja program tersebut.
 - b. Dukungan sumber daya berupa sarana dan prasarana Kawasan Tanpa Rokok serta alokasi pembiayaan program Kawasan Tanpa Rokok dari Dinas Kesehatan
 - c. Pengadaan dan pemanfaatan *smoking room*
3. Disposisi
 - Komitmen pelaksana program dalam melaksanakan program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Kereta Api Poncol Kota Semarang.
 4. Struktur birokrasi
 - Adanya SOP mengenai program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Kereta Api Poncol Kota Semarang yang sistematis dan mudah dipahami pelaksana program.

D. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif dan jenis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan serta fenomena-fenomena menurut pandangan dan definisi partisipan. Penelitian metode kualitatif dan jenis deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status fenomena, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

2. Situs Penelitian

Situs penelitian menetapkan wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan tentang

Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang. Lokasi penelitian di Stasiun Poncol Kota Semarang. Lokasi dipilih karena merupakan salah satu ruang publik yang dikunjungi oleh banyak masyarakat dari berbagai kalangan.

3. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2009: 218-219).

4. Jenis Data

Penelitian tentang Implementasi Program Kawasan Tanpa Rokok Stasiun Kereta Api Poncol Kota Semarang memperoleh jenis data:

- a. Data primer
- b. Data Sekunder

D.1. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini jenis-jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kata-kata dan Tindakan
2. Sumber Tertulis.
3. Data Statistik

D.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

- a. Wawancara.
- b. Observasi.
- c. Dokumentasi
- d. Studi Pustaka.

D.3. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data ke suatu bentuk yang lebih mudah dimengerti dan dipahami yang kemudian diinterpretasikan dalam sebuah laporan penelitian. Adapun proses kegiatan analisis data ini (Sugiyono, 2009: 247-253) terdiri dari :

- a. Reduksi data
- b. Penyajian data
- c. Conclusion Drawing / verification

D.4. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Penelitian kualitatif harus memiliki standar kredibilitas. Standar kredibilitas ini untuk menunjukkan agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan (informasi yang digali dari subyek atau partisipan yang diteliti). Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu dengan triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut (dalam Sugiyono, 2009: 241)

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik triangulasi. Hal ini berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (dalam Sugiyono, 2009: 241). Peneliti menggunakan pengumpulan data dengan menggabungkan wawancara mendalam, dokumentasi dari data

Laporan Tahunan jumlah perkiraan, suspek, dan penemuan kasus Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Kereta Api Poncol Kota Semarang, serta studi terhadap literatur yang berkaitan dengan program Kawasan Tanpa Rokok.

E. PEMBAHASAN

E.1. Aktor-aktor utama implementasi program

Dalam setiap implementasi program terdapat aktor dibalik kesuksesan program tersebut. Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah-masyarakat/ swasta, atau implementasi yang diswastakan (dalam Nugorho, 2011:650). Dalam program Kawasan Tanpa Rokok diterangkan bahwa program tersebut di instruksikan oleh Dinas Kesehatan.

Fenomena ketepatan pelaksana dilihat dari aktor utama implementasi telah tepat., dapat dilihat dari pihak Stasiun Poncol Kota Semarang memiliki komitmen yang tinggi sebagai pelaksana program Kawasan Tanpa Rokok. Melalui bagian pelayanan pihak stasiun menjalankan program tersebut. Komitmen tinggi terlihat dari Kepala Stasiun yang menjamin dalam perjalanan kereta api bebas asap rokok.

Kemudian faktor pendorong lainnya yaitu kesesuaian organisasi birokrasi, yang menjadi pelaksana program dapat menentukan keberhasilan program Kawasan Tanpa Rokok. Apabila organisasi birokrasi telah sesuai tugas, pokok, dan fungsinya maka program akan berjalan dengan baik dan akan mendapatkan hasil yang optimal. Kesesuaian organisasi birokrasi ditunjukkan oleh Divisi Pelayanan Stasiun Poncol untuk melaksanakan program yang sesuai dengan tugas, pokok,

dan fungsinya. Tugas dari Divisi Pelayanan memang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan, memonitoring kegiatan Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

E.2. Keterlibatan Pihak Swasta dan Masyarakat Terkait dalam Pelaksanaan Program Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan fenomena ketepatan pelaksana dilihat dari keterlibatan atau tenant dan masyarakat dalam pelaksanaan program masih belum tepat. Karena koordinasi lintas sektor memang sudah dilaksanakan oleh Pihak Stasiun, namun dukungan dari pemerintah yang menangani dan berwenang dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok belum sepenuhnya berkoordinasi dengan Pihak Stasiun.

Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor pendukung dalam implementasi program Kawasan Tanpa Rokok yaitu komunikasi. Faktor komunikasi menjadi krusial karena pesan awal yang dilakukan oleh Stasiun Poncol sebagai pelaksana program sudah dapat dikatakan maksimal karena sudah dapat menggandeng tenant/penyewa menaati peraturan tersebut dengan adanya koordinasi yang dilakukan dapat mendukung dalam pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok.

E.3. Program Kawasan Tanpa Rokok Tidak Tumpang Tindih dengan Program Lain

Hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa program tersebut dilaksanakan sesuai isi program. Seperti surat keputusan yang diberikan langsung oleh pihak stasiun pusat kepada stasiun-stasiun yang dibawahnya, dengan begitu stasiun tersebut menjalankan tugas langsung dari instruksi pusat.

Fenomena ketepatan target dilihat dari program Kawasan Tanpa Rokok tidak terjadi tumpang tindih dengan program lain dan tidak ditemukan permasalahan. Hal ini dikarenakan terdapat faktor pendorong implementasi program Kawasan Tanpa

Rokok di Stasiun Poncol yaitu disposisi. Disposisi disini dalam bentuk sikap pelaksana untuk tidak mencampuradukkan program tersebut dengan program lain yang nantinya dapat menghambat tujuan implementasi. Dinas Kesehatan Kota Semarang memang terdapat program kesehatan lainnya. Namun, berkat sikap dari pelaksana program Kawasan Tanpa Rokok dan melakukan pengawasan terhadap perokok secara ketat dan lebih diperhatikan. Dengan demikian pelaksana program lebih memperketat pengawasan kepada para perokok yang ada sehingga dapat mengurangi jumlah perokok yang ada.

E.4. Kondisi pelaksana program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang

Ketepatan target disini dengan melihat apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam kondisi konflik atau harmoni, apakah kondisi target menerima atau menolak (dalam Nugroho, 2011: 651). Hal ini berarti kondisi masyarakat yang menerima program Kawasan Tanpa Rokok dengan baik. Kondisi masyarakat sebagai target yang menerima dengan baik program dapat memudahkan pelaksana program dalam melaksanakan program Kawasan Tanpa Rokok dan mencapai keberhasilan program, karena masyarakat sudah mengetahui semua dan pelaksana program tinggal mengontrol dan mengawasi pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang

Hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan program, Stasiun Poncol yang dapat menerima dengan baik program Kawasan Tanpa Rokok, melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan fenomena ketepatan target dilihat dari pelaksana dalam menerima program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang belum

tepat. Hal ini dikarenakan terdapat faktor penghambat implementasi program yaitu komunikasi. Komunikasi disini dalam bentuk sosialisasi kepada pihak stasiun mengenai program Kawasan Tanpa Rokok. Komunikasi sebenarnya sudah dilakukan tetapi masih kurang intensif. Selama ini sosialisasi hanya dilakukan oleh Dinas satu kali dalam setahun. Sosialisasi yang dilakukan dirasa belum maksimal karena dilakukan tidak secara rutin dan berkelanjutan, selama ini sosialisasi dilakukan hanya dengan menempel poster, stiker larangan merokok, dan adanya pemberitahuan dari announcer stasiun.

E.5. Interaksi antara Pemerintah Pusat dengan Pelaksana Program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang (Lingkungan Internal)

Lingkungan internal kebijakan merupakan hubungan antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan (dalam Nugroho, 2011:651). Dalam program Kawasan Tanpa Rokok dilihat dari interaksi yang berpengaruh antara pemerintah pusat sebagai perumus kebijakan dengan pihak Stasiun Poncol sebagai pelaksana program dalam melaksanakan program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang

Berdasarkan hasil interview, peneliti menemukan bahwa interaksi yang berpengaruh dari pemerintah pusat dengan pihak Stasiun Poncol dalam bentuk kegiatan pembinaan yang berjalan kepada pengelola program, pihak stasiun hanya mendapat instruksi dari pusat saja namun pemerintah yang berwenang belum ada andil yang terlalu krusial dalam pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang. Interaksi antara pemerintah pusat sebagai pembuat program dengan pelaksana program belum berjalan. Hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan program karena pelaksana program belum dapat mengkonsultasikan hasil perkembangan

pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang kepada pemerintah pusat untuk diberikan rekomendasi. Selain itu interaksi yang baik terjalin antara perumus program dengan pelaksana program menyebabkan pelaksanaan program menjadi tidak maksimal.

E.6. Bentuk Interpretasi *Tenant* atau Penyewa dalam Implementasi Program Kawasan Tanpa Rokok (Lingkungan Eksternal)

Lingkungan eksternal kebijakan berkenaan dengan pihak swasta dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan (dalam Nugroho, 2011:652). Dalam hal ini pihak swasta adalah *tenant* atau penyewa yang berada di lingkungan Stasiun Poncol, seperti *cafe* maupun swalayan dan toko. Berdasarkan hasil interview, peneliti menemukan bahwa sebagai penyewa di lingkungan stasiun sudah memasang tanda larangan merokok seperti poster, *sticker* di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak stasiun, namun masih ditemukan adanya penjualan rokok yang mudah ditemukan dan dibeli masyarakat, bisa dikatakan program tersebut belum berhasil secara maksimal karena meski dapat dikatakan sukses menerapkan kawasan tanpa asap rokok, PT KAI masih belum dapat menghilangkan iklan atau sponsor produk rokok yang masih dapat ditemui di *tenant* yang berada di lingkungan stasiun.

E.7. Kesiapan pelaksana program dalam melaksanakan program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang

Dari hasil interview ditemukan bahwa kesiapan pelaksana sendiri sudah siap, karena pihak stasiun sudah memahami pentingnya KTR di tempat umum, hal tersebut dapat dilihat dari adanya aktivitas pengawasan dan penertiban oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR oleh pihak stasiun yang sudah berjalan selama tiga

tahun belakangan ini. Pihak stasiun sudah memasang pengumuman dan tanda-tanda larangan dalam rangka melaksanakan ketentuan larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau memproduksi produk tembakau.

Salah satu jalan yang ditempuh PT.KAI adalah dengan menyediakan area merokok di sebelah ujung stasiun. Khusus untuk di dalam kereta api guna meningkatkan kenyamanan penumpang PT.Kereta Api melarang penumpang merokok di dalam kereta api mulai 11 November 2011. Kebijakan dilarang merokok di dalam kereta api tersebut berlaku untuk semua kelas baik ekonomi, bisnis, maupun eksekutif. PT KAI menyatakan bahwa alasan larangan merokok ini karena ruang kereta api yang tertutup menyebabkan asap rokok tidak mudah keluar, selain itu asap rokok dinilai sangat mengganggu kesehatan penumpang lain khususnya yang merupakan perokok pasif.

Namun hal lain yang bertentangan dengan program KTR juga ditemukan dilapangan, dimana dengan mudah dijumpai orang yang merokok di area bertuliskan “Kawasan Dilarang Merokok” dan tidak adanya teguran dari pihak stasiun.

E.8. Kesiapan Masyarakat dalam Memahami dan Ikut Serta Menjadi Bagian Program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang

Berdasarkan hasil interview, masyarakat yang berada di sekitar Stasiun Poncol sudah memahami dan mengerti akan adanya program KTR. Selain mendukung masyarakat juga sudah menerapkan KTR di lingkungan stasiun, dengan tidak merokok lingkungan KTR dan merokok di tempat yang sudah disediakan oleh pihak stasiun. Namun nampaknya pihak pemerintah belum bisa berharap banyak dari peranserta masyarakat dalam implementasi kebijakan ini, karena pada kenyataannya masyarakat lebih cenderung memilih untuk menghindari orang-orang yang merokok

daripada menerapkan tindakan asertif atau menegur orang tersebut.

E.9. Faktor yang mempengaruhi implementasi program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang

Komunikasi

Penyampaian informasi yang intensif dan akurat mengenai program Kawasan Tanpa Rokok dari pelaksana program (Dinas Kesehatan) kepada pemegang program di Stasiun Kereta Api Poncol Kota Semarang

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

Dalam hal implementasi Program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang, komunikasi yang dilakukan adalah antara pihak stasiun dengan masyarakat di sekitar lingkungan stasiun dan juga penyewa/tenant yang berada di lingkungan stasiun. Komunikasi tersebut dapat bersifat sosialisai, yang isinya adalah membahas apa itu program KTR, dimana saja tempat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk merokok dan sanksi serta konsekwensi yang diterima jika melanggar program tersebut

Berkaitan dengan sosialisasi yang diadakan oleh pihak stasiun melakukan sosialisasi secara lisan melalui *announcer* dan dengan menempel poster larangan merokok. Kegiatan sosialisasi tersebut memberikan informasi mengenai dimana letak area merokok yang telah disediakan oleh pihak stasiun. Masyarakat juga diajak melaksanakan program tersebut agar

lingkungan stasiun menjadi lebih nyaman dan bebas asap rokok. Pemahaman yang baik dari masyarakat mengenai tujuan dan manfaat KTR dapat menjadi dukungan baik terhadap kelanjutan implementasi KTR di Stasiun Poncol Kota Semarang. Kendala yang dirasakan oleh masyarakat adalah kurangnya tanda larangan merokok, sehingga beberapa masyarakat mengaku belum mengetahui adanya KTR di lingkungan Stasiun Poncol.

Sumber daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam hal implementasi suatu program. Sebaik apapun kebijakan jika tidak didukung oleh implementor yang berkompeten di bidangnya dan jumlah yang mencukupi, maka tidak akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan dari hasil wawancara terkait sumber daya, kompetensi implementor sudah baik karena setiap personel pihak stasiun sudah mengerti dan memahami program KTR dan siap menegur masyarakat yang melakukan pelanggaran. Namun kendala yang dihadapi oleh pihak Stasiun Poncol adalah jumlah dari penegak hukum yang telah disiapkan oleh pihak stasiun masih kurang. Sehingga tidak dapat mengawasi satu persatu masyarakat yang setiap harinya berada di lingkungan Stasiun Poncol.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi implementasi suatu program atau kebijakan. Hal ini dikarenakan bahwa, tiap apapun yang dilakukan pemerintah terutama dalam rangka menjalankan suatu kebijakan untuk menanggulangi permasalahan yang ada pada masyarakat, tentu membutuhkan biaya yang pastinya tidak sedikit. Terlebih lagi penelitian ini membahas mengenai program KTR,

dimana program tersebut memiliki anggaran dalam pengadaan instrumen kelengkapan *smoking area*. Untuk kesiapan pembiayaan terdapat faktor penghambat implementasi program yaitu sumber daya. Sumber daya dalam hal ini adalah sumber pendanaan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan program, karena semua pembiayaan langsung dari pusat dalam bentuk barang seperti kursi tunggu, asbak, beberapa neon box, namun masih belum dapat mencakup keseluruhan wilayah yang ada di Stasiun Poncol, belum adanya ruangan tertutup khusus membuat asap tetap keluar ke lingkungan sekitar Kawasan Tanpa Rokok, dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Semarang belum membantu pihak stasiun dalam pengadaan barang-barang tersebut.

Disposisi

Komitmen politis pelaksana program dalam melaksanakan program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Kereta Api Poncol Kota Semarang menjadi sangat penting karena jika tidak ada komitmen dari implementor untuk menegakkan program, maka program tersebut akan sia-sia. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa komitmen tinggi dimiliki oleh pihak stasiun sebagai pengelola program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang. Komitmen untuk tetap melaksanakan program dan untuk menanggulangi masalah diantaranya dengan menjamin gerbong kereta bebas asap rokok selama perjalanan dan melaksanakan sanksi tegas bagi pelanggar dengan sanksi diturunkan di stasiun berikutnya tanpa ada pengembalian uang tiket jika kedapatan merokok di gerbong kereta. Selain itu, pihak stasiun mewajibkan seluruh staffnya untuk mengingatkan para pelanggar yang merokok di lingkungan KTR, dan menganjurkan untuk merokok ditempat yang sudah disediakan.

Struktur Birokrasi

Adanya Standard Operational Procedure (SOP) mengenai program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Kereta Api Poncol Kota Semarang yang sistematis dan mudah dipahami pelaksana program. SOP merupakan acuan atau pedoman bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota, serta pengelola tempat umum seperti bidang transportasi umum. Program KTR tersebut di laksanakan pada tahun 2012, menurut Perda 3 Tahun 2013, Perwal 1 Tahun 2014, mengikuti instruksi dari Undang Undang. Sesuai dengan yang tertera di dalam program tersebut, yaitu meliputi 7 kawasan titik KTR dalam menetapkan KTR, seperti tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain, tempat ibadah, tempat kerja, kendaraan umum. Untuk faktor struktur birokrasi, divisi pelayanan Stasiun Poncol sudah memahami secara keseluruhan isi dari program Kawasan Tanpa Rokok, dan dalam pelaksanaannya sudah terstruktur dengan baik dengan adanya standar KTR yang sesuai dengan peraturan. Kendala yang dihadapi oleh pihak stasiun adalah ada masalah dalam prosedur penerapan program tersebut, karena kurangnya bantuan dari pemerintah dalam memberikan standar bagaimana cara pelaksanaan KTR yang baik dan benar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol Kota Semarang

Berdasarkan pembahasan tentang implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini dapat dikatakan berhasil, akan tetapi masih kurang optimal. Meskipun demikian terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai maupun oleh masyarakat, Stasiun Poncol menjadi lebih rapi dan nyaman dengan berkurangnya

polusi udara akibat paparan asap rokok, berkurangnya sampah yg berserakan akibat puntung rokok, dan berkurangnya jumlah iklan rokok. Hal ini membawa manfaat bagi masyarakat (pengunjung stasiun) baik dari segi sosial, lingkungan maupun segi kesehatan.

Program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Poncol sudah berjalan hampir 3 tahun dengan baik karena adanya instruksi yang jelas dalam internal stasiun Kesiapan masyarakat dalam memahami dan ikut serta menjadi bagian program Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Kereta Api Poncol Kota Semarang. Masyarakat yang sadar akan pentingnya program ini walaupun masih ada beberapa pelanggaran yang ditemukan, namun secara garis besar program ini mendapatkan dukungan dan respon positif dari masyarakat pengguna jasa Stasiun Poncol Kota Semarang.

SARAN

Saran untuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat program KTR di Stasiun Poncol :

1. Masyarakat yang mendukung program tersebut dan sebagian besar sudah memahami isi dari program tersebut sehingga hal tersebut harus di pertahankan, dan masyarakat diharapkan untuk dapat mengingatkan pengunjung lain.
2. Pihak stasiun harus memperhatikan komitmen yang sudah berjalan selama tiga tahun ini agar program KTR ini semakin baik kedepanya.

Saran untuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat program KTR di Stasiun Poncol :

1. Perlu adanya komitmen dari Dinas Kesehatan yang

diberikan kepada PT.KAI yang mendukung Stasiun Poncol untuk mendukung implementasi kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pengadaan *smoking room* di lingkungan stasiun yang terisolasi sendiri dan ruangannya tertutup sehingga asap tidak keluar area khusus merokok.

2. Dinas Kesehatan Kota Semarang harus lebih tanggap dan mendukung program KTR secara *real* dan turun ke lapangan untuk melaksanakan sosialisasi yang rutin tentang program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama. 2004. *Administrasi dan Pemberdayaan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dinas Kesehatan Kota Semarang Profil Kesehatan Angka Tahun 2013
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Administrasi Publik konsep, teori, dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusgoyo, Cahyo (2012). *Data Perokok di Kota Semarang*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Semarang.
- Moleong, J. Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant (2011). *Public Policy (edisi ketiga)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2002). *Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis (cetakan ke-8)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- World Health Organization www.who.int diakses pada tanggal 24 Desember 2014 pukul 22.45 WIB.
- semarang.go.id/diakses pada tanggal 5 Januari 2015 pukul 08.15 WIB.
- SuaraMerdeka.com/news/20110419/915/Indonesian.aspx diakses pada 20 April 2015 pukul 18.45
- www.antaraneews.com/berita/497280/menkeu-pinjaman-bank-dunia-digunakan-sesuai-kebutuhan diakses 17 April 2015 pukul 19:50
- www.maschun.com/2015/06/hari-tanpa-tembakau-sedunia-2015-demi.html diakses pada 11 Juni 2015 pukul 20:09
- www.tempo.co diakses pada 11 Juni 2015 pukul 20:00